

**MEMBANGUN
DINASTI POLITIK
OLIGARKI YANG KORUP
(Fenomena Pilkada Serentak 2020)**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA**

SANKSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

MEMBANGUN DINASTI POLITIK OLIGARKI YANG KORUP (Fenomena Pilkada Serentak 2020)



**MEMBANGUN
DINASTI POLITIK
OLIGARKI YANG KORUP
(Fenomena Pilkada Serentak 2020)**

Pol-07 (x + 50) 15,5 x 23 cm

Penulis:
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Proofreader: Efriza
Editor: Tim Kreasi Cendekia Pustaka
Desain Sampul: Hans Saputra
Layout isi: Hans Saputra

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I: Agustus 2021

Diterbitkan oleh:
Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)
Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830
kreasicendekiapustaka@yahoo.com
Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019

ISBN: 978-623-95801-x-x

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Setulus-tulusnya kami panjatkan rasa syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kerja keras kami dipermudah dalam langkah kami untuk menerbitkan buku keempat dari Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., yang berjudul: *Membangun Dinasti Politik-Oligarki yang Korup (Fenomena Pilkada Serentak 2020)*.

Amalia Syauket adalah penulis yang produktif, sejak 2019 hingga kini, karya-karyanya dipercayakan kepada Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP). Amalia Syauket memiliki konsentrasi terhadap Korupsi dan Otonomi Daerah. Sehingga karya-karya yang dihasilkannya tak dapat dilepaskan dari konsentrasi yang dimilikinya, seperti Monograf *Perempuan dalam Pusaran Korupsi* (2019); lalu dilanjutkan, Monograf *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (2020); dan di tahun ini dengan karya sebelumnya, buku Referensi *Octopussy, Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten* (2021).

Pemilu serentak (*concurrent election*) secara pengertian adalah sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jika ditelusuri dalam perkembangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahwa sejak 2015 lalu, Pilkada tidak lagi dilaksanakan secara sendiri-sendiri, melainkan dilaksanakan secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya, sampai dengan Pilkada Serentak 2020 kemarin, hasil kajian Amalia

menunjukkan dinamika politik tingkat lokal menampakkan potret buram dengan adanya kemunculan dinasti politik. Terungkap bahwa 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik, hal yang sama terjadi sebelumnya pada Pemilihan Legislatif 2019 bahwa 71,25 persen daerah pemilihan (dapil) terpapar dinasti politik atau sekitar 17,22 persen anggota DPR-RI merupakan bagian dari dinasti politik.

Hasil kajian dari buku ini menjelaskan hasil temuan yakni: pertama, adanya orang kuat yang bertransformasi melalui rute sebagai *local bossism* kemudian membangun dinasti politik dan terakhir memperkuat oligarki; dan terakhir, adanya keterhubungan dari Kekuasaan dan Korupsi, bahwa Dinasti Politik-Oligarki Politik bertujuan melanggengkan kekuasaan, dengan semakin langgeng kekuasaannya, maka semakin besar potensi korupsinya.

Penyajian dalam penulisan ini dapat dinikmati dengan renyah oleh pembaca. Selain karena bahasa yang digunakan sederhana tetapi juga didukung dengan susunan dari pembahasan yang tepat. Seperti antara lain, pembaca diajak untuk memahami akan Pilkada Serentak 2020 yang bersifat Formalitas Demokrasi, dilanjutkan dengan memahami Rute Orang Kuat Lokal dalam Membangun Dinasti Politik-Oligarki Pemerintahan, kemudian menjelaskan Oligarki di Partai Politik dalam Pilkada, dan tentu juga dibahas mengenai, Potensi Korupsi pada Orang Kuat Lokal dalam Pilkada Serentak 2020.

Penulisan yang disajikan oleh Amalia menjadi penting untuk kita renungkan dan pelajari kembali kondisi reformasi, utamanya Pilkada yang telah menghasilkan Dinasti Politik dan Oligarki Politik sehingga menjerumuskan Indonesia pada pusaran korupsi yang semakin dalam di tingkat lokal.

Akhir kata, penerbit mengucapkan banyak terima kasih kepada Penulis yang tetap mempercayai Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) untuk menerbitkan buku-buku dari hasil penelitiannya. Selanjutnya, tak bosan kami menutup dengan meninggalkan pesan kepada Pembaca, bahwa kami akan selalu terbuka menerima kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan mutu terbitan kami.

Selamat membaca.

Depok, 17 Agustus 2021

Efriza

(Direktur Penerbit KCP)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan yang maha kuasa, buku Membangun Dinasti Politik-Oligarki yang Korup (Fenomena Pilkada Serentak 2020) ini dapat diterbitkan. Tanpa izin dan ridha-Nya niscaya buku ini tidak akan dapat diterbitkan.

Pemilu Serentak (*concurrent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkatan, yang terentang dari tingkat Nasional hingga pemilihan daerah tingkat lokal. Sayangnya, sampai dengan Pilkada Serentak 2020, dinamika politik tersebut menampilkan potret buram yakni kemunculan Dinasti Politik yang menurut berbagai sumber disebut “Pilkada Serentak 2020 Ramai Dinasti Politik”, bahkan *Koran Tempo* menampilkan *cover story* “Pesta Keluarga Berkuasa” pada Edisi 20 Juli 2020. Sebanyak 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Demikian pula pada Pemilihan Legislatif 2019 menunjukkan 71,25% dapil terpapar dinasti politik atau sekitar 17,22% anggota DPR-RI merupakan bagian dari dinasti politik.

Hasil kajian dalam buku ini menemukan bahwa: **Pertama:** Orang kuat bertansformasi melalui rute sebagai *Local Bossism* kemudian membangun dinasti politik dan terakhir memperkuat oligarki. Fenomena pada Pilkada Serentak 2020 menggambarkan terdapat dinasti politik yang kalah dalam

Pilkada Serentak 2020 sebanyak 72 orang kandidat selain yang berhasil mengantarkan kandidatnya membentuk Dinasti Politik sebanyak 57 orang kandidat. Hal ini menggambarkan bahwa ada kesepakatan dalam diam dari masyarakat pemilih untuk menolak dinasti politik. Sedangkan terhadap 27 Kepala Daerah terpilih yang kemenangannya digugat ke Mahkamah Konstitusi, menggambarkan ada persoalan legitimasi dalam terpilihnya calon yang berlatarbelakang dinasti politik. **Kedua**, Dinasti-Oligarki politik bertujuan melanggengkan kekuasaan, semakin langgeng kekuasaannya, semakin besar potensi korupsinya.

Penulisan dalam buku ini menjadi menarik karena mengkaji orang kuat dalam Pilkada Serentak 2020 di Indonesia, yang masih sangat terbatas referensinya sehingga kehadiran buku ini dapat melengkapi keterbatasan literatur dalam studi orang kuat dalam politik lokal di Indonesia.

Sebagaimana buku kajian hasil penelitian yang lain, tentu saja memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan ini tentu saja memberi peluang untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. yang telah memberikan kesempatan untuk terus berkarya mengaktualisasikan potensi akademik dalam beragam bentuk karya ilmiah termasuk buku seperti ini.

Peneliti/Penulis,
Amalia Syauket

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit ~ v

Kata Pengantar ~ viii

Daftar Isi ~ x

1

Pendahuluan ~ 1

2

Formalitas Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 ~ 5

3

**Rute Orang Kuat Lokal dalam Membangun Dinasti
Politik-Oligarki Pemerintahan ~ 14**

4

Oligarki Partai Politik dalam Pilkada ~ 25

5

**Potensi Korupsi pada Orang Kuat Lokal dalam Pilkada
Serentak 2020 ~ 32**

6

Penutup ~ 39

Referensi ~ 41

Daftar Pustaka ~ 45

Tentang Penulis ~ 49

1

PENDAHULUAN

Pembangunan demokrasi melalui Pilkada Langsung, di satu sisi patut di apresiasi, tetapi di sisi lain juga jangan sampai larut dalam jebakan formalitas demokrasi. Formalitas demokrasi tidak hanya mengancam bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, tetapi juga bisa menciptakan rezim politik yang semata-mata bekerja melayani kekuasaan, bukan melayani masyarakat yang menjadi sumber kedaulatan sejati. Inilah yang sering disebut sebagai Pilkada yang menghasilkan demokrasi semu, penuh dengan formalitas dan gagal melahirkan kekuasaan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Hasil Riset Nagara Institute menunjukkan bahwa formalitas demokrasi yang dipraktikkan pada Pilkada Serentak 2020

melahirkan dinasti politik. Terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik, yang sebarannya hampir merata di 270 daerah pemilihan baik di tingkat Provinsi-Kabupaten maupun Kota. Sedangkan bila dilihat dari partai pengusung, maka tampak Partai Golongan Karya adalah partai terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh PDIP dan Nasdem.

Fenomena transformasi orang kuat lokal dalam membangun dinasti politik-oligarki di tingkat lokal melalui tahap pertama maju berkonstestasi dalam pilkada, memenangkan pilkada dan mengumpulkan modal yang bersumber dari proyek-proyek pemerintah daerah. Tahap kedua, setelah memperoleh modal yang cukup, mereka maju kembali dalam Pilkada menjadi *incumbent*, mempertahankan kekuasaan dengan memperluas proyek-proyek dan jabatan dalam pemerintahan. Tahap ketiga adalah tahap ketika mereka mulai membangun dinasti politik dan oligarkinya. Mereka mulai mendorong istri-anak-menantu untuk maju dalam Pilkada. Oligarki dibangun dengan cara membeli kebijakan partai politik, memperluas akses serta penguasaan atas sumber ekonomi dan politik daerah. Dengan demikian, fenomena Pilkada Serentak 2020 adalah transformasi orang kuat menjadi *local bossism* yang kemudian mencoba membangun dinasti politik dan membentuk pemerintahan oligarki.

Salah satu dampak negatif yang mengerikan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan adalah menyebarnya virus-virus korupsi ke berbagai daerah. Semaraknya korupsi di daerah merupakan efek samping dari pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa hal krusial yang

ditimbulkan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan antara lain:

1. Terbukanya peluang terjadinya *money politics*, yang dilakukan kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota DPRD sebagai setoran kepada partai politik serta keinginan memperkaya diri.
3. Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan peraturan antara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.

Buku ini bertujuan mengulas fenomena orang kuat yang telah lama menjadi perdebatan karena berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia yaitu bagaimana transformasi orang kuat lokal dalam membangun Dinasti-Oligarki Politik yang korup di tingkat lokal khususnya pada fenomena yang tampak pada Pilkada Serentak 2020 yang lalu.

Hal penting yang dibahas dalam buku ini adalah menelusuri bagaimana rute orang kuat lokal dalam membangun Dinasti-Oligarki beserta potensi korupsi yang dilakukan orang kuat lokal pada Pilkada Serentak 2020.

Pengulasan dan penelusuran pembahasan dalam buku ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologi dengan metode deskriptif, diperkuat dengan teknik penulisan 4M yakni Menggambarkan, Menganalisis, Mendeskripsikan, dan Menyimpulkan.

Sumber data utama berupa data sekunder dari kepustakaan antara lain Jurnal dan hasil riset dari Lembaga-lembaga independen, berbagai media online juga diskusi dengan berbagai pelaku di lapangan yang dekat dengan kekuasaan sebagai tim sukses.

2

FORMALITAS DEMOKRASI PADA PILKADA SERENTAK 2020

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana sekaligus instrumen terpenting demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil ketika proses pemilu diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat masih mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi Pemerintahan yang berkuasa. Keyakinan akan Pemilu sebagai instrumen terpenting bagi demokratisasi memperoleh legitimasi yang kuat dari Samuel P. Huntington.¹

Dalam Pandangan Huntington,² Pemilu bukan hanya memungkinkan demokrasi menjadi operasional di akar rumput yakni memungkinkan rakyat memilih sesuai dengan preferensi politiknya, melainkan juga berjalannya pemerintahan suatu negara secara legitimatif, meskipun secara teoritis kontribusi pemilu dalam penegakan demokrasi masih sebatas dalam wilayah prosedural. Salah satu syarat terpenuhinya demokrasi prosedural-minimal adalah jabatan politik diduduki melalui pemilihan, adanya pemilu yang jujur dan adil, serta rotasi kekuasaan secara damai melalui kebebasan dan kontestasi publik yang *fair*, pelibatan substansial setiap individu dalam penyelenggaraan kekuasaan, dan adanya jaminan memadai terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikonsepsikan Held sebagai Otonomi Demokrasi (*Democratic Autonomy*).³

Pemilu Serentak (*concurrent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.⁴ Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkatan, yang terentang dari tingkat nasional hingga pemilihan daerah tingkat lokal.

Dapat dikatakan peristiwa paling dramatis bangsa Indonesia di akhir abad ke-20 adalah pergerakan menuju demokratisasi. Indonesia mengalami perubahan dan transisi dalam proses demokratisasi, ditandai dengan keterbukaan politik yang berlangsung sejak tahun 1998 dengan capaian penting antara lain adanya pertumbuhan *civil society*, kebebasan pers dan tuntutan akuntabilitas pemerintahan. Sejak Pilkada Langsung dilaksanakan tahun 2005, hingga Pilkada (langsung) Serentak 2015, demokrasi di tingkat lokal mengalami dinamika

yang cukup signifikan. Pilkada Langsung dan Pilkada Serentak merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baru sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaksanaan Pilkada di fase pertama ini tidak dilakukan serentak, melainkan terpisah-pisah antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Baru di tahun 2015 upaya penyerentakan dilakukan. Hingga saat ini sudah empat kali pilkada serentak dilakukan yakni tahun 2015, 2017 dan 2018. Pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, Indonesia kembali menggelar Pilkada Serentak Episode ke-4 bagi 270 Daerah pemilihan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota dengan jumlah 719 pasangan calon. Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih di Negara Demokrasi. Sejak diputuskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan serentak, beberapa daerah melaksanakannya di hari yang sama sesuai dengan tahun berlaku kepemimpinan masing-masing. Hal tersebut kerap kali menjadi suatu jadwal mutlak yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun di negeri Demokrasi ini.

Pilkada adalah tanda kembalinya semangat penegakan paham-paham demokrasi yang otentik.⁵ Pilkada juga bentuk dari semangat menjalankan demokrasi, khususnya di tingkat lokal yang menandai masa transisi dari Orde Baru yang sangat

sentralisasi (otoriter) ke Orde Reformasi yang lebih terdesentralisasi. Menurut Erb dan Priyambudi⁶ bahwa pada tahun 2005 Indonesia memiliki pengalaman pertama kalinya memilih pemimpin nasional secara langsung dan ini adalah momentum awal demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah merupakan hal baru dari demokrasi yang secara tidak langsung juga memberikan pencerahan politik bagi masyarakat, pemerataan kesejahteraan serta mengajarkan nilai-nilai luhur dari demokrasi.

Sayangnya, sampai dengan Pilkada Serentak 2020, dinamika politik tersebut menampakkan potret buram yakni kemunculan Dinasti Politik yang menurut berbagai sumber disebut “Pilkada Serentak 2020 Ramai Dinasti Politik”, bahkan Koran Tempo menampilkan *cover story* “Pesta Keluarga Berkuasa” pada Edisi 20 Juli 2020⁷ dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Calon Gubernur	Calon Bupati	Calon Wali Kota
5 calon Gubernur dan 4 calon wakil Gubernur	57 calon Bupati dan 30 calon wakil Bupati	20 calon walikota dan 8 calon wakil wali kota

Sumber: Nagara Institute, 2020, diakses tanggal 8 Juli 2021.

Betapa tidak, Hasil temuan Nagara Institute tersebut telah menunjukkan sebanyak 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah tersebut, bila diklasifikasikan berdasarkan gender, maka tampak pada Tabel 2.

Tabel 2

Deskripsi	Keterangan
67 Laki-laki = 89,3%	Sebanyak 89,3% para laki-laki yang berkontestasi merupakan bagian dari Dinasti Politik baik sebagai anak-saudara dari Kepala Daerah sebelumnya
57 Perempuan = 10,7%	29 kandidat perempuan yang merupakan istri dari Kepala Daerah sebelumnya.

Sumber: Nagara Institute, 2020, diakses tanggal 8 Juli 2021.

Pada Pilkada Serentak 2020, masih menyisakan penyakit pragmatisme partai politik dalam merekrut dan menyuburkan dinasti politik, yang fenomenanya tampak pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3

Deskripsi	Keterangan
Dinasti Politik yang mencalonkan dalam Pilkada Serentak 2020	124 orang
Dinasti Politik Calon Tunggal	8 orang
Dinasti Politik yang kalah Pilkada	72 orang

Dinasti Politik yang menang Pilkada	57 orang
Dari 57 Dinasti Politik	27 Dinasti Politik masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) 30 Dinasti Politik Tidak masuk ke MK
Dari 16 Daerah yang di tetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh MK	6 Daerah yang diikuti oleh pasangan Dinasti Politik

Sumber: Nagara Institute, 2020, diakses tanggal 8 Juli 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa formalisme demokrasi yang dipraktikkan dalam Pilkada Serentak 2020, melahirkan Dinasti Politik. Fenomena tersebut Juga menampakkan bahwa pembangunan demokrasi melalui Pilkada Serentak, di satu sisi patut diapresiasi, tetapi di sisi lain menampakkan adanya jebakan dalam formalitas demokrasi. Formalitas demokrasi tidak hanya menjadi ancaman bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menciptakan rezim politik yang semata-mata bekerja untuk melayani kekuasaan, bukan melayani rakyat yang menjadi sumber kedaulatan sejati. Inilah yang sering disebut sebagai Pilkada yang menghasilkan demokrasi semu, penuh dengan formalitas dan gagal melahirkan kekuasaan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat.⁸

Demokrasi Semu adalah model formalitas demokrasi, hal mana semua proses demokrasi yang dilakukan secara prosedural bisa dijalankan dengan baik, tetapi di dalamnya mengandung bahaya. Pilkada Serentak yang digelar pada

tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, paling tidak mengandung 5 (lima) bahaya formalisme demokrasi, antara lain:

1. Fenomena Orang Kuat misalnya, telah menjadi fenomena yang wajar alias lazim⁹ dalam Pilkada, hal mana Pilkada dikendalikan dan dikuasai pemodal besar. Yang menyebabkan demokrasi kita berbiaya tinggi. Orang kuat bahkan menguasai partai politik. Partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan orang kuat untuk merebut kekuasaan. Potret yang tampak bahwa di beberapa daerah ada begitu banyak petahana yang selalu terpilih di dalam pilkada, padahal prestasi, inovasi, dan kisah sukses mereka dalam mengelola pemerintahan sangat terbatas.
2. Pilkada masih dilihat hanya sebagai suatu pesta demokrasi, yang ditandai dengan mobilitas yang tinggi, baik melalui janji-janji kampanye kandidat maupun melalui pembagian beras-baju dan uang. Pilkada Serentak belum sepenuhnya dijadikan sebagai arena untuk melakukan *Deepening Democracy* atau pendalaman demokrasi.
3. Pengaturan Pilkada menyediakan mekanisme bagi calon tunggal, tetapi mekanisme ini sangat sulit untuk dipenuhi, sehingga pencalonan melalui partai politik tetap menjadi pintu utama untuk maju dalam Pilkada. Untuk mendapatkan rekomendasi partai yang merupakan surat sakti, hanya orang kuat yang bisa mengakses.
4. Pilkada menjadi arena pluralisme demokrasi, tetapi dengan fenomena kemunculan orang kuat dan calon tunggal, mencerminkan bahwa pluralisme demokrasi hanya bersifat formalitas demokrasi semata. Arena Demokrasi tetap saja dikendalikan dan dikuasai oleh orang kuat.

5. Pilkada seakan-akan memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa masyarakatlah yang mempunyai kedaulatan. Tetapi faktanya, kedaulatan rakyat kerap dimanipulasi dan dipertukarkan dengan janji manis para politisi yang hanya bersifat musiman.⁸

Jebakan formalisme demokrasi ini kemudian menyebabkan kita terlalu sibuk dengan euforia Pilkada sebagai suatu pesta, tetapi kurang peduli dengan deliberatif demokrasi yang menjadi esensinya. Pilkada pada akhirnya selalu menjadi pesta kekuasaan, pestanya orang kuat yang mencoba mendapatkan legitimasi dengan cara legal formal, tetapi gagal memperkuat kedaulatan rakyat yang menjadikan rakyat sebagai pusat pendidikan demokrasi.

Potret buram berikutnya berupa Fenomena kemunculan calon tunggal yang berasal dari dinasti politik dan Dinasti Politik dilakukan dengan memborong partai untuk memenangkan kontestasi Pilkada, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi dalam pemilu berupa prinsip *free and fair election* yang memberikan ruang dan kesempatan kepada semua warga negara untuk berkontestasi.⁸

Fenomena kemunculan dan berkembangnya calon tunggal dalam Pilkada, disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Kandidat yang maju dalam ajang Pilkada merupakan *Local Strongman* yang memiliki pengaruh sangat besar baik terhadap lembaga politik formal terlebih terhadap organisasi non-formal.
2. Kandidat yang maju dalam ajang Pilkada merupakan *Incumbent* yang telah menjelmakan dirinya menjadi *Local*

Bossism, sehingga tidak ada lawanandingnya yang seimbang.

3. Kandidat yang maju dalam ajang Pilkada merupakan *Local Bossism* yang membeli semua partai politik.
4. Kandidat yang maju merupakan calon kepala daerah hasil politik dinasti pada Pilkada sebelumnya.¹⁰

Di sisi lain, kemunculan Dinasti Politik melalui mekanisme calon tunggal juga mempresentasikan lemahnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Politik. Kemunculan Orang Kuat yang bertransformasi membangun dinasti politik telah menjebak dan menjadikan partai politik hanya sebagai kuda tunggangan saja. Jika partai politik tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, maka perpolitikan di Indonesia terutama politik lokal akan terus diwarnai oleh penguasaan orang kuat.

Kondisi sebagaimana ditampakkan pada fenomena tersebut yang diidentifikasi oleh Liddle¹¹ sebagai salah satu bentuk "*Pretended-Democracy*" atau demokrasi pura-pura, atau menurut Aspinal¹² menyebutnya sebagai *Quasi-Democracy*. Sementara itu peneliti lain mengistilahkan dengan *Predatoric Democracy* atau demokrasi yang dikendalikan oleh para politikus-predator atau menurut Heynes¹³ menyebutnya sebagai *Pseudo Democracy* atau demokrasi semu, yang kesemuanya itu umumnya dipengaruhi oleh pelaksanaan demokrasi yang bercorak patrimonial, dangkal dan substantif. Ini artinya, demokrasi di daerah hanya dikuasai oleh jaringan orang-orang tertentu saja.

3

RUTE ORANG KUAT LOKAL DALAM MEMBANGUN DINASTI POLITIK-OLIGARKI PEMERINTAHAN

Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan orang kuat adalah seseorang baik secara personal maupun komunal yang memiliki kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), pengaruh (*influence*), suara (*voice*), kontrol (*control*) dan akses (*access*) untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan mereka. Orang Kuat juga didukung dengan berbagai macam sumber daya seperti modal sosial, finansial, spiritual, kultural, tradisional, intelektual maupun struktural.

Berdasarkan hal tersebut, pada Pilkada Serentak 2020, Oktav Pahlevi¹⁴ memetakan terdapat Tipologi Orang Kuat dalam Pilkada, ke dalam tiga tipe. **Pertama, tradisional/kultural** adalah kelompok orang-orang kuat yang memberikan dukungan kepada pasangan calon, berdasarkan basis etnis, pemilik modal maupun orang kaya lokal yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat tradisional. **Kedua, intelektual/spiritual**, sekelompok orang kuat yang memiliki pengaruh karena ilmu yang mereka miliki, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. **Ketiga, struktural/material**, tipologi orang kuat yang memiliki pengaruh karena jabatan yang melekat dalam diri mereka maupun adanya finansial kapital untuk mendukung kemenangan pasangan calon dalam kontestasi politik.

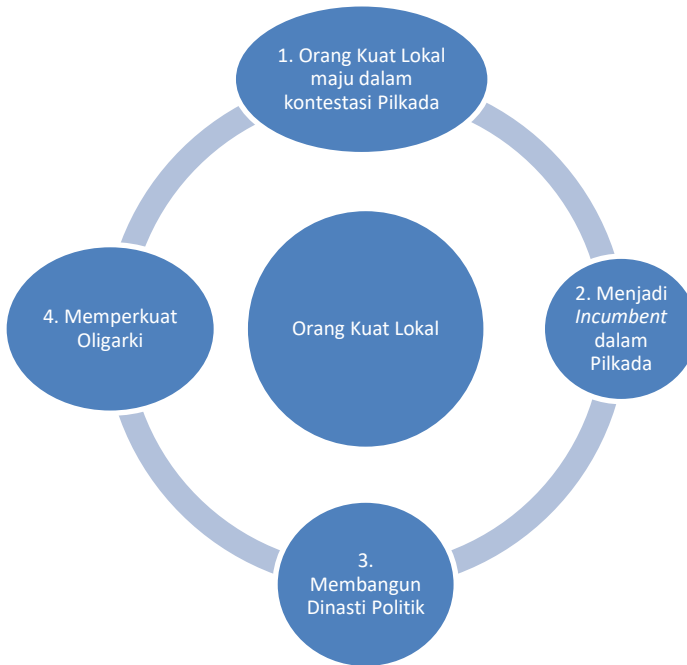
Dari fenomena dan tipologi di atas, tampak bahwa Pilkada Serentak 2020 adalah upaya mentransformasikan orang kuat lokal dalam membangun politik dinasti. Konsolidasi orang kuat lokal atau dalam bahasa Joel S. Migdal¹⁵ disebut dengan *Local Strongman* dalam sistem politik klientelisme yang mencerminkan pertukaran kekuasaan dengan sumber daya ekonomi. Menurut Jonathan Hopkin,¹⁶ klientelisme adalah istilah yang menggambarkan distribusi manfaat secara selektif kepada individu-individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik. Dengan kata lain, klientelisme adalah cara untuk menggambarkan pola pertukaran yang tidak seimbang dan hierarkis yang merupakan karakter masyarakat feodal yang bertahan sampai terbentuk dan berkembangnya demokrasi modern.¹⁰

Dalam kaitannya dengan Pilkada Serentak, praktik klientelisme merupakan sesuatu yang jamak terjadi. Praktik ini bahkan menjamur dalam praktik elektoral di Indonesia. Arlan

Siddha¹⁷ menggambarkan model klientelisme dalam Pilkada Serentak antara lain:

1. Partai sebagai Patron dan Kandidat sebagai Klien, yang ditunjukkan dengan melalui surat sakti berupa rekomendasi partai.
2. Hubungan klientelisme antara kandidat dengan Tim sukses, yang mana Kandidat sebagai patron dan Tim sukses sebagai klien yang ditunjukkan melalui pemberian hadiah berupa jatah proyek-proyek pemerintah.
3. Klientelisme antara kandidat dengan konstituen, hal mana kandidat sebagai patron dan konstituen sebagai klien yang ditunjukkan dengan pemberian uang dan jabatan dalam pemerintahan.

Rute orang kuat lokal dalam membangun dinasti dan oligarki, tampak pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Rute Pembangunan Dinasti oleh Orang Kuat

Sumber: Diolah dari berbagai literatur

Menurut Kim Litelnoni,¹⁸ oligarki adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat hanya pada sekelompok orang kaya. Sebelum kelompok ini menjadi kelompok oligarki, mereka semata-mata menjadi orang kuat, yang kemudian bertransformasi membangun dinasti dan pada akhirnya menciptakan oligarki dalam pemerintahan. Oligarki ini dibentuk sebagai usaha mereka menjadikan kekuasaan politik sebagai sumber daya ekonomi untuk menguasai pemerintahan.

Gambar 1 menjelaskan rute sebelum orang kuat lokal membangun dinasti politik dan menjadi kelompok oligarki. **Pada tahap pertama**, Sebelum membangun dinasti politik, orang kuat

lokal bukanlah siapa-siapa. Mereka umumnya berasal dari lapisan sosial masyarakat biasa yang kemudian mereka maju berkontestasi dalam Pilkada, memenangkan Pilkada dan pada akhirnya mereka mengumpulkan modal yang bersumber dari proyek-proyek pemerintah daerah. Tujuan pada tahap pertama ini adalah merebut kekuasaan. **Tahap kedua**, setelah mereka memperoleh modal yang cukup, mereka maju lagi dalam Pilkada sebagai *incumbent*, dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dengan memperluas kekuasaan mereka terhadap proyek-proyek dan jabatan dalam pemerintahan.

Tujuan yang hendak dicapai pada tahap kedua ini adalah menggunakan kekuasaan untuk mengakumulasikan modal dalam mengumpulkan harta kekayaan. **Tahap ketiga**, ketika sang *incumbent* sukses menjadi kepala daerah dua periode, mereka mulai membangun dinasti politiknya dengan mendorong istri, anak, menantu, ipar untuk maju dalam Pilkada dengan harta kekayaan yang telah diperoleh pada tahap kedua.

Kemenangan dalam Pilkada untuk mengembalikan harta kekayaan yang telah dikeluarkan dalam Pilkada. Model Dinasti Politik pada Pilkada Serentak 2020 memiliki varian lain, yakni adanya kompetisi antar dinasti politik. *Model pertama*, kompetisi perebutan calon kepala daerah yang diperebutkan oleh beberapa dinasti politik. Kompetisi perebutan calon kepala daerah ini tergolong *fair* meski dijangkiti oleh dinasti politik, karena kompetisi yang terbangun memiliki basis kekuatan yang berimbang yakni pertarungan antar dinasti. *Model kedua*, kompetisi antara “sesama” dinasti politik dalam satu keluarga, misalnya saling kompetisi istri-ipar-keponakan. Oligarki ini dengan cara membeli partai politik yang berarti perselingkuhan pengusaha dengan Ketua Partai Politik guna melakukan

pembiayaan terhadap rangkaian proses politik, menentukan keputusan serta rekomendasi partai, memfasilitasi calon tertentu hingga terpilih dengan tujuan menguasai partai politik dan memperluas akses serta penguasaan mereka atas sumber daya ekonomi daerah.¹⁰ Dalam rangka memperkuat Oligarki, Lingkaran Dinasti Politik-Oligarki itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain dalam rangka memperkuat Oligarki memasuki pada **Tahap keempat**.

Secara sederhana, Tabel 4 di bawah ini menjelaskan Rute yang ada pada Gambar 1:

Rute	Orang Kuat Lokal	Boss Lokal/Local Bossism	Dinasti Politik	Memperkuat Oligarki
	1	2	3	4
Ciri-ciri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontes-tasi dalam Pilkada. 2. Memenangkan Pilkada. 3. Mengumpul-modal yang bersumber dari APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi <i>Incumbent</i> dalam Pilkada. 2. Memper-tahankan kekuasaan. 3. Memper-luas kekuasaan atas sumber daya ekonomi: Jual-beli jabatan, mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Istri, anak, menantu, ipar maju dalam Pilkada. 2. Melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi: melakukan pengumpulan ekonomi ilegal seperti judi, penyelun-dupan, penebangan liar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli kebijakan partai politik. 2. Menguasai partai politik. 3. Memperkuat kartel politik.

Rute	Orang Kuat Lokal	Boss Lokal/ <i>Local Bossism</i>	Dinasti Politik	Memperkuat Oligarki
	1	2	3	4
		mengatur Peraturan , mengatur keringanan pajak, mengatur pinjaman dari BPD.		

Sumber: Diolah dari berbagai Literatur, 2021.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020 adalah transformasi orang kuat lokal menjadi *Local Bossism* yang kemudian mencoba membangun politik dinasti dan membentuk pemerintahan oligarki. Realitas dinasti politik yang demikian menurut Richard Robinson dan Vedi R. Hafiz¹⁹ salah satunya disebabkan oleh pedang bermata dua dari desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain memberikan kekuasaan pada daerah dalam membentuk rumah tangganya sendiri, desentralisasi otonomi daerah memicu adanya desentralisasi korupsi yang tersebar ke berbagai daerah yang kemudian menyeret elite politik. Yang kemudian inilah yang mengakibatkan otonomi daerah mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan terjadinya praktik dinasti politik. Raja-raja kecil di daerah yang lahir dari otonomi daerah akhirnya menjadikan Pilkada sebagai industri pertahanan kekuasaan yang berkorelasi juga pada pertahanan kekayaan.

Dinasti politik merupakan jenis lain dari transisi dan sirkulasi kekuasaan politik yang melibatkan anggota keluarga. Menurut Jaweng²⁰ Dinasti politik terbagi menjadi tiga model. *Model pertama*, model dimana satu keluarga memegang sebuah kekuasaan dan menggumpul dalam satu lingkaran kekerabatan serta dilakukan atas regenerasi keluarga yang sama. *Model kedua*, model satu keluarga yang terbagi atas politik lintas kamar kekuasaan, misalnya Ayah menjabat sebagai Bupati, anak menjabat sebagai Ketua DPRD serta jabatan strategis lainnya. *Model ketiga*, model dinasti lintas daerah dimana setidaknya ada dua politisi yang berkuasa di daerah yang berbeda, namun kedua politisi tersebut sepertinya masih terkait dalam satu lingkaran keluarga.

Pada Tabel di bawah ini merupakan contoh dari rute orang kuat lokal dalam membangun dinasti politik Kediri yang tertua dan terlama di Indonesia yang menurut Robert Endi Jaweng¹⁷ fenomena di Kabupaten Kediri ini termasuk dalam model dinasti regenerasi. Dinasti politik ini dilakukan secara bergilir tanpa jeda.

Tabel 5

Masa	Nama	Jabatan	Keterangan
1999-2009	Sutrisno	Bupati dua periode	Ketua DPC PDI-P Kediri (setelah Selesai masa Bhakti sebagai Bupati Kediri)
2009-2015	Hariyanti Sutrisno (Istri 1)	Bupati dua periode	Mengangkat: <ul style="list-style-type: none"> • Sutrisno (suami) sebagai Ketua TPPD

2016-2021			<ul style="list-style-type: none"> • Sukani (adik ipar) sebagai Ketua DPRD • Rachmadi Yogiantoro, (menantu) sebagai Ketua KADIN
-----------	--	--	---

Eksistensi Dinasti Sutrisno pada puncak kekuasaan di Kediri bertahan karena kemampuannya mempergunakan jaringan patronase. Awalnya, Sutrisno sebelum menjabat menjadi bupati Kediri ialah menjadi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam bidang pertanian.²² Selama bekerja menjadi PPL, ia juga menjalin relasi dan melakukan komunikasi kepada banyak pihak terutama pemangku kekuasaan di desa yang ada di wilayah kabupaten Kediri. Ia menjalin kerjasama dalam bentuk politik transaksional kepada para pejabat pemerintahan desa salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di desa, dampaknya adalah simpati dan dukungan masyarakat agar tertuju padanya, karena ia berhasil membantu pembangunan di desa-desa di wilayah Kabupaten Kediri yang selama ini tertinggal dan akhirnya bisa berkembang.

Masyarakat di Kediri seolah-olah sudah dibuat terkondisikan oleh sikap dan kebijakan Sutrisno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada saat istrinya menjabat dua periode sebagai bupati, Pak Sutrisno juga diberikan jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan kabupaten Kediri yaitu menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah (TPPD). Hal inilah yang dimanfaatkan betul oleh Sutrisno dengan melakukan kartelisasi politik dalam bentuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Banyak relasi pejabat atau orang yang bekerja di bawahnya mengabdikan dengan loyal agar

mendapat timbal balik berupa jabatan atau proyek-proyek strategis dalam pembangunan pemerintahan. Sutrisno memiliki tujuan agar segala urusan pemerintahan dan kekuasaan yang telah dibangun tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Akhirnya, banyak pihak yang berlomba-lomba yang mendekat dan siap membantu Pak Sutrisno dan Bu Haryanti baik dari orang lama atau orang baru.

Hubungan timbal balik antara patron-klien yang saling menguntungkan inilah yang menjadikan bertahannya sebuah kekuasaan dalam satu wilayah. Ini merupakan salah satu bentuk pendekatan politik dengan cara melibatkan masyarakat dalam proyek ekonominya. Apalagi didukung dengan adanya anggaran dana desa dari pemerintahan pusat juga menjadikan segala kebijakan dari Sutrisno yang dibuat melalui istrinya bisa berjalan dengan efektif. Dengan berada dibalik layar, Sutrisno bias lebih leluasa dalam mengatur jalinan relasi keluarga yang menduduki kursi daerah beserta pejabat legislatifnya untuk tetap solid dan konsisten dalam pembangunan politik dinasti.

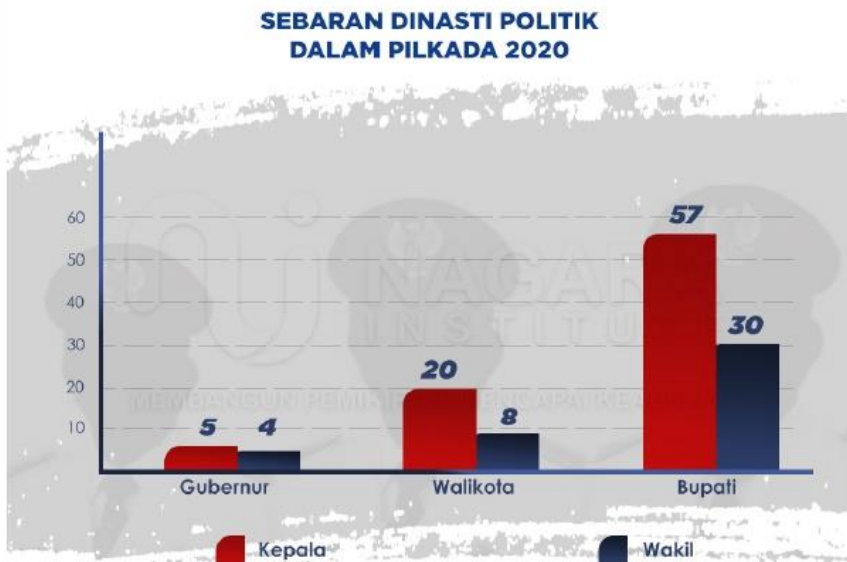
Dinasti Sutrisno bertahan selama 20 tahun, pada Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Kediri hanya diikuti calon tunggal Hanindhito Himawan Pramana yang berpasangan dengan Dewi Mariya Ulfa sebagai calon Wakil Bupati Kediri, yang diusung oleh semua partai politik di Kediri, yakni PDIP, PKB, NasDem, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP.²³

Model Dinasti Politik yang berkembang di Indonesia selama bertahun-tahun masih mengikuti pola yang sama. Mulai dari dinasti politik yang mempertahankan kuasa dalam satu wilayah, dinasti politik yang meluaskan kekuasaan ke luar wilayah dan lintas kekuasaan, hingga istri kepala daerah yang maju dalam pilkada dalam rangka melanggengkan/

mempertahankan kebijakan suaminya terdahulu saat menjabat.

Dari berbagai data tersebut tampak bahwa pada Pilkada Serentak 2020, terdapat 124 calon yang terpapar dinasti politik yang sebarannya seperti pada Edugrafis 1 di bawah ini.

Edugrafis 1



Sumber: Nagara Institute, 2020, diakses tanggal 24 Juli 2021.

Dua puluh tahun setelah Reformasi 1998, dinasti politik tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Dinasti politik dapat dijumpai pada semua partai politik pengusung, di semua tingkatan pemerintahan dan di berbagai daerah di Indonesia.

Pada Pilkada Serentak 2020, yang diikuti oleh 270 daerah, yang digelar pada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Tampak bahwa setengah dari jumlah provinsi menggelar pilkada yang terafiliasi dengan dinasti politik. Yang terbanyak terpapar dinasti politik pada gelaran pilkada adalah Kabupaten.

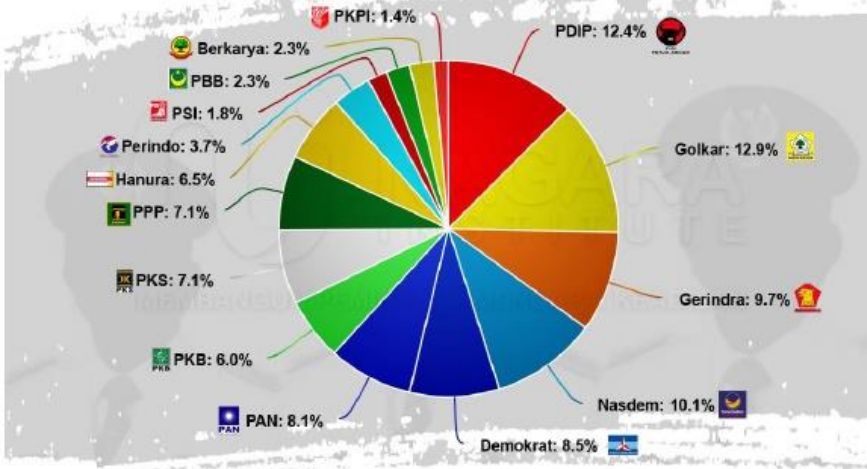
4

OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM PILKADA

Munculnya dinasti dan oligarki partai politik, secara prosedural dan struktural, bukan hanya terjadi di sekitar pemerintahan, tetapi juga di sektor partai politik.²⁴ Kemunculannya kemudian mengubah fungsi utama partai politik karena partai kemudian dikelola seolah-olah menjadi institusi keluarga atau lembaga privat. Hal ini kemudian membuka iklim yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi partai politik. Dari berbagai literatur dan media, fenomena partai politik pengusung dinasti politik semakin menguat, seperti contoh Edugrafis 2 di bawah ini.

Edugrafis 2

PRESENTASE PARTAI POLITIK PENGUSUNG DINASTI POLITIK



Sumber: Nagara Institut, 2020, diakses tanggal, 11 Juli 2021.

Jika dilihat berdasarkan partai pengusung, Partai Golongan Karya adalah partai terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh PDIP dan Partai Nasdem. Hal tersebut diperkuat dengan pemikiran Edward Aspinall dan Mada Sukmajati²⁵ bahwa partai Golongan Karya termasuk dalam tipikal partai *Catch-all* yang tidak berakar kuat pada konstituen tertentu. Namun demikian, partai Golkar mempunyai basis sosial tertentu terutama kelompok birokrat dan pebisnis. Dan, tidak mengherankan, karena Golkar adalah mesin patronase klasik dalam sistem elektoral di Indonesia. PDIP adalah partai berkarakter nasionalis, memiliki banyak pengikut tradisional di kawasan-kawasan muslim abangan dan kawasan minoritas yang sangat bergantung pada ketokohan dan patronasenya.²⁶ Sedangkan Nasdem, masih menurut

Tomsa²⁶ bertipe partai presidensial yaitu partai yang didirikan oleh atau para tokoh politik utamanya yang berlatar belakang purnawirawan jendral atau pengusaha ekonomi yang mempunyai ambisi untuk meraih posisi presidensial.

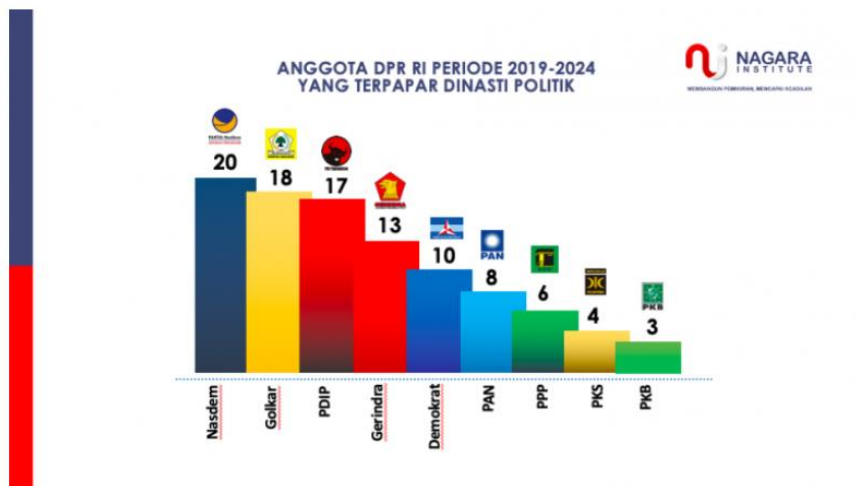
Terdapat beberapa gejala yang mendasarinya antara lain, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjangkau kepala daerah dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Menyitir pandangan dari Yoes C. Kenawas²⁷ hubungan dinasti politik dengan partai politik adalah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Karena setiap kandidat dinasti politik tentunya membutuhkan dukungan partai politik yang sudah memiliki mesin penggerak yang terbilang mapan untuk mensukseskan calon dinasti dalam pilkada. Partai Politik juga mengharapkan politisi dinasti dapat berkontribusi besar pada partai dan mendanai operasional partai sehari-hari di daerah. Pola saling menguntungkan ini terawat baik dalam perkembangan politik di Indonesia.

Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan negosiasi dan pragmatis antara partai politik dengan kandidat. Para kandidat untuk maju dalam kontestasi pilkada, memerlukan “perahu” yang akan menominasikan atau melapangkan jalan bagi proses pencalonan diri mereka melalui transaksi yang dibayar tunai, guna membeli perahu yang dibutuhkan.²⁸ Meminjam pendapat Arlan Siddha¹⁷ dalam kondisi yang demikian Partai sebagai Patron dan Kandidat sebagai Klien, yang ditunjukkan dengan melalui surat sakti berupa rekomendasi partai.

Dinasti politik juga meningkat pada Pemilihan Legislatif 2019, dimana sekitar 17,22% anggota DPR-RI masa bhakti

2019-2024 merupakan bagian dari dinasti politik. Sebab memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan maupun kombinasi keduanya, seperti tergambar pada Edugrafis 3 di bawah ini.

Edugrafis 3



Sumber: Nagara Institute, 2020, diakses tanggal,13 Juli 2021.

Dari edugrafis tersebut tampak sebanyak 99 dari 575 anggota DPR-RI terpapar dinasti politik.²⁹ Partai Nasdem yang paling terpapar dinasti politik di DPR-RI. Sebanyak 20 dari 59 Anggota DPR-RI dari partai Nasdem terpapar dinasti politik. Artinya, mereka memiliki kaitan kekerabatan dengan pejabat publik. Pada posisi kedua ditempati partai Golkar dengan meloloskan 18 orang anggota, kemudian disusul oleh PDIP sebanyak 17 orang anggota dan Partai Demokrat sebanyak 10 orang anggota yang terpapar dinasti politik.

Fenomena seperti tersebut diatas pada Edugrafis 3 merupakan pertanda dari bekerjanya politik patronase, dan legislator hanya tertarik pada proses-proses penganggaran

karena berharap bisa mendapatkan akses terhadap program sosial, proyek-proyek pembangunan, dan bentuk-bentuk pembelanjaan negara yang bisa memberikan keuntungan politik bagi para pendukungnya.²⁵

Dari pernyataan di atas memperlihatkan praktik yang dikenal sebagai Klientelisme politik.²⁸ Klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang, atau uang tunai kepada pemilih baik individu maupun kelompok-kelompok kecil. Dengan itu mereka diharapkan bisa membalasnya dengan memberikan suara bagi para politisi tersebut. Barang-barang dan bantuan tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari amplop berisi uang tunai hingga bantuan untuk meloloskan seorang anak pemilih ke dalam program beasiswa pemerintah, dari sebuah pekerjaan sebagai buruh di sebuah rumah sakit hingga sebuah kontrak proyek pembangunan dari pemerintah.

Dari 124 calon dinasti pada Pilkada Serentak 2020 tersebut, jika dirinci berdasarkan partai pengusung maka tampak bahwa Partai Golkar, yang menurut Tomsa²⁶ adalah mesin patronase klasik dalam politik elektoral di Indonesia adalah partai politik terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh PDIP dan Nasdem.

Yang menjadi alasan obyektif partai dalam pengisian jabatan publik antara lain berupa adanya gabungan yang sifatnya sistemik antara kekuatan politik dan kekuatan finansial, juga adanya ketergantungan partai terhadap dukungan

pemodal yang dipertukarkan dengan hak khusus. Artinya ada ketimpangan ekonomi dengan 0,0000000002 persen masyarakat menguasai 10 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.³⁰ Sedangkan sebab alasan subyektif, seperti keinginan untuk selalu di dalam pemerintahan dan menentukan jalannya pemerintahan dengan kata lain, masih adanya warisan Orde Baru dalam sistem ekonomi politik. Aktor politik, bisnis, dan birokrasi berkoalisi untuk menghasilkan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat³⁰ dan rekrutmen politik dan kaderisasi partai yang sarat kepentingan politik elit. Edugrafis 4³¹ di bawah ini menegaskan hal tersebut.

Edugrafis 4



Sumber: Bisnis.com, 2019, diakses tanggal, 13 Juli 2021.

Fenomena tersebut hal mana sistem politik dikuasai oleh segelintir aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang massif serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial, akan membuat tatanan kekuasaan yang memusat di bawah kendali elit dalam jumlah yang sangat kecil. Di sisi lain, adanya oligarki ini menunjukkan kondisi struktural yang penuh ketimpangan, kompetisi elektoral yang mahal dan tidak transparan serta menunjukkan lemahnya institusi Negara terhadap kekuatan finansial oligarki.

Dalam pengertian lain, Gaetano Mosca dalam Abd. Halim²⁴ menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah (kelas Elit) dan kelas yang diperintah (Non-elit). Ketika keluarga dan sanak saudara pihak yang memerintah atau berkuasa turut menguasai pos-pos strategis dalam kekuasaan inilah, maka dinasti atau oligarki politik muncul. Dan, ketika calon yang berkonstestasi itu-itu saja, dari kalangan tertentu saja, di sinilah letak oligarki di partai politik.

5

POTENSI KORUPSI PADA ORANG KUAT LOKAL DALAM PILKADA SERENTAK 2020

Salah satu dampak negatif yang mengerikan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan adalah menyebarnya virus-virus korupsi ke berbagai daerah. Semaraknya korupsi di daerah merupakan efek samping dari pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa hal krusial yang ditimbulkan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan menurut Abd. Halim²⁴ antara lain:

1. Terbukanya peluang terjadinya *money politics*, yang dilakukan kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan DPRD.
2. Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota DPRD sebagai setoran kepada partai politik serta keinginan memperkaya diri.
3. Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan peraturan antara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.

Nawawi Pomolango³² membeberkan lima modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. **Pertama**, yakni melakukan intervensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); **kedua**, yaitu campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah; **ketiga**, ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan; **keempat**, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai; dan **kelima**, penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. Menurut Firli Bahuri,³³ dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Pilkada Langsung, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Pola korupsi pemerintahan daerah menurut KPK:³⁴ (1) pola korupsi berkaitan dengan perizinan – sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan; (2) pola korupsi berkaitan dengan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) – legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan; (3) pola korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah; (4) pola korupsi berkaitan dengan promosi, mutasi dan suap jabatan; dan (5) pola korupsi berkaitan dengan dana desa – merupakan pola mutakhir.

Dari berbagai narasumber yang kami temui, faktor politik biaya tinggi dituding sebagai penyebab terdorongnya pejabat pemerintah “terpaksa” melakukan korupsi. Mereka harus menanggung biaya operasional politik, menyumbang partai dan bahkan tuntutan konstituennya untuk ‘menyumbang’ sesuatu, kalau tidak mereka *enggan* memilikinya. Akibatnya, para pejabat eksekutif dan legislatif di daerah bersekongkol memanipulasi APBD untuk kepentingan biaya politik tersebut. Sehingga, selama masalah biaya politik tinggi ini tidak ada solusinya, maka tidak heran para pejabat tinggi yang dipilih lebih kepada kemampuannya untuk menggalang dana baik dari diri sendiri atau kerabat dekatnya. Sehingga, tidak heran pejabat tinggi yang dipilih lebih mempunyai karakteristik transaksional daripada yang mempunyai visi membawa perubahan transformasional.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang monopoli kekuasaan disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW),³⁵ bentuk korupsi anggota dewan daerah adalah penyuaipan dan penyalahgunaan anggaran. Praktik korupsi terjadi dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki DPRD, yaitu pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembuatan peraturan. Nilai suap yang diterima mulai dari belasan juta hingga miliaran rupiah. Besarannya sangat bergantung pada kedudukan anggota tersebut dalam DPRD. Tentu saja jatah suap untuk pimpinan DPRD atau fraksi lebih besar daripada anggota biasa.

Setidaknya ada lima modus korupsi yang umumnya dilakukan rombongan anggota DPRD. **Pertama**, menerima suap untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban kepala daerah atau penetapan APBD. Suap cara ini sering kali disebut “uang ketok palu”. Agar tidak ada penolakan dari legislatif, kepala daerah harus mengeluarkan uang suap untuk pimpinan maupun semua anggota DPRD. **Kedua**, menambah pendapatan anggota dan pimpinan Dewan secara tidak sah melalui pos anggaran DPRD. **Ketiga**, menitipkan proyek atau alokasi khusus melalui anggaran yang diusulkan pemerintah. **Keempat**, penggunaan dana APBD tidak sesuai peruntukan dan tanpa bukti pendukung. **Kelima**, suap dalam proses penyusunan dan pengesahan sebuah peraturan daerah.

Selain untuk memperkaya diri sendiri, motif korupsi anggota dewan adalah untuk menutupi biaya politik yang telah dan akan dikeluarkan menjelang pemilu legislatif. Dalam kasus korupsi di Malang, dari 41 anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka, 20 orang mencalonkan diri lagi dalam Pemilu Legislatif 2019.

Besarnya biaya politik untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dan penghasilan sebagai anggota dewan yang

dianggap tak memadai tampaknya membuat banyak wakil rakyat daerah ini nekat mencari tambahan dan juga korupsi. Akhirnya, banyak politisi yang mencoba peruntungan dengan korupsi ketika menjadi anggota dewan.

Pola Dinasti Politik dan Penyalahgunaan kewenangan

Hasil Penelitian ini menjelaskan pola dinasti politik dan penyalahgunaan kewenangan, sebagai berikut.

1. Ketika suami menjabat sebagai Kepala Daerah, lalu Istri-Anak sebagai anggota DPRD di berbagai tingkatan misalnya, sebagai anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan dukungan sumber daya kekuasaan dari Suami/ Bapak sebagai Patronnya.
2. Setelah 10 tahun menjabat dan tidak bisa maju dalam konstestasi pilkada, jabatan publik diserahkan kepada istri/anaknya. Pada Pilkada Serentak 2020, sebanyak 29 kandidat perempuan yang merupakan istri dari Kepala Daerah sebelumnya, dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya kekuasaan saat masih menjabat, termasuk misalnya setiap jabatan dalam pemerintahan dibarter dengan uang. Upaya mempertahankan kekuasaan juga dilakukan dengan memperkuat penguasaan proyek-proyek pemerintah. Artinya, ada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan kian mengencang, dan keinginan adanya hegemoni keluarga dalam pemerintahan daerah semakin menguat. Sementara suami yang tidak menjabat secara formal, bertindak sebagai *godfather* dibalik pemerintahan istrinya, seperti memberi arahan, nasihat, maupun petunjuk dalam mengeluarkan kebijakan tertentu. Dalam tataran

inilah Wasisto Rahardja Djati³⁶ menyebutnya sebagai “Kuasa Gono-Gini”, untuk menggambarkan istri berada pada ranah formal sedangkan suami berada di ranah sosial informal, kembali sebagai orang biasa.

3. Ketika menjabat pun, jabatan-jabatan strategis pada ranah eksekutif seperti kepala dinas yang menjadi kunci anggaran diserahkan kepada istri/anak/menantu kerabat dekat atau kroni-kroninya dengan tujuan untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Bahwa dominasi orang kuat dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari *in-return cost* atau investasi politik dan ekonomi yang ditanam pada masa menjabat.³⁷
4. Segala fasilitas yang didapat dari hasil kronisme, digunakan untuk mendapat “tiket” dari Kebijakan Partai Politik guna berkontestasi menjadi Gubernur/Bupati/Walikota.

Oligarki dekat dengan korupsi. Hal ini sebagaimana pendapat Jeffrey A. Winters³⁸ bahwa seorang oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Upaya penguasaan atas berbagai sumber daya tersebutlah yang memungkinkan seorang oligark melakukan korupsi. Hal senada dengan pendapat Masykurudin³⁹ bahwa dinasti politik bertujuan melanggengkan kekuasaan, semakin langgeng kekuasaannya, semakin besar potensi korupsinya. Persoalan utama dari dinasti politik adalah penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan *check and balance* dalam pemerintahan. Terutama apabila dinasti telah mencengkeram

eksekutif dan legislatif. Persoalan tersebutlah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi. Hal ini disebabkan karena:

1. Dinasti menguasai posisi politik, baik kepala daerah maupun DPRD, yang membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dinasti politik menjadi bukti tidak terbantahkan. Terlebih lagi apabila dinasti juga menguasai birokrasi di daerah.
2. Dinasti politik membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya.⁴⁰ Dua hal di atas menjadi faktor yang memicu potensi korupsi yang lebih besar untuk dilakukan anggota dinasti politik.

6

PENUTUP

Hasil kajian ini menemukan bahwa orang kuat bertransformasi melalui rute sebagai *local bossism* kemudian membangun dinasti politik dan terakhir memperkuat oligarki. Fenomena pada Pilkada Serentak 2020 menggambarkan terdapat dinasti politik yang kalah dalam Pilkada Serentak 2020 sebanyak 72 orang kandidat selain yang berhasil mengantarkan kandidatnya membentuk Dinasti Politik sebanyak 57 orang kandidat. Hal ini menggambarkan bahwa ada kesepakatan dalam diam dari masyarakat pemilih untuk menolak dinasti politik. Sedangkan terhadap 27 Kepala Daerah terpilih yang kemenangannya digugat ke MK, menggambarkan ada persoalan legitimasi dalam terpilihnya calon yang berlatarbelakang dinasti

politik. Dinasti-Oligarki politik bertujuan melanggengkan kekuasaan, semakin langgeng kekuasaannya, semakin besar potensi korupsinya. Selain daripada itu Dinasti-Oligarki Politik bertujuan melanggengkan kekuasaan, semakin langgeng kekuasaannya, semakin besar potensi korupsinya.

Dari sanalah, ketika dinasti politik, korupsi kepala daerah, dan pilkada Serentak memiliki relevansi satu sama lain. Disadari atau tidak, dinasti tumbuh subur melalui proses pemilu. Raja-raja kecil di daerah tersebut menguasai berbagai lini jabatan di daerah, baik sebagai kepala daerah dan legislatif. Partai politik memegang peran besar dalam tumbuhnya dinasti politik, utamanya di daerah. Oligarki yang menjangkiti partai politik selama ini telah mengakibatkan cacatnya mekanisme kandidasi dan pencalonan kader partai untuk berkontestasi dalam pemilu. Dasar pencalonan tersebut menjadi tidak jelas, tidak terukur, dan tidak memprioritaskan kemampuan serta integritas bakal calon. Semua bergantung pada selera elit partai. Pada saat yang sama, dinasti politik menguasai partai politik. Kelompok dinasti tersebut mengunci berbagai pos-pos penting dalam tubuh partai, baik pada level daerah maupun nasional. Alih-alih peran partai dapat diandalkan untuk memangkas dinasti politik, yang terjadi justru dinasti politik sudah terlebih dahulu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

REFERENSI

1. Samuel P. Huntington dalam Aidul Fitriada Azhari, **Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi**, Perspektif Ketatanegaraan, Jurisprudensi, Vol. 1, No. 2, September 2004.
2. MB. Zubakhum Tjenreng, **Pilkada Serentak**, Pustaka Kemang, Depok, 2016.
3. David Held, **Model of Democracy**, Cambridge Polity Press, 1987.
4. Benny Geys, **Explaining Voter Turnout: a Review of Angggregate-Level Research**, dalam *Electoral Studies* 25, 2016.
5. Ilham Yamin, **Democracy and Incumbent Political Power; Takalar Election 2007**, Incodec IPDN.
6. Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, **Deepening Democracy Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)**, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2009.
7. <http://Koran.tempo.co>, **Pesta Keluarga Berkuasa (cover story)**, Edisi 20 Juli 2020, diakses tanggal 11 Juli 2021.
8. Ari Pradhanawati, **Kontestasi Orang Kuat Dalam Pilkada**, IPD Press, Yogyakarta, 2021.
9. Eric C. Chang dan Yun-han Chu, **Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracy**, the *Journal of Politics*, Vol 68 (2), Mei 2006.
10. Gregorius Sahdan dan Besar Tirto Husodo, **Transformasi Orang Kuat dalam Pilkada Serentak 2020**, IPD Press, Yogyakarta, 2021.

11. R. William Liddle dan Saiful Mujani, **Islamist Parties and Democracy: The Indonesian Case**, Makalah, Ohio State University, 2007.
12. E. Aspinall, **Elections and Normalization of Politics in Indonesia**, South East Asia Research, 13(2), 2005.
13. Jeff. Heynes, **Democracy and Political Change in the Third World**, London and New York, 2001.
14. Oktav Pahlevi, **Orang Kuat dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2020**, IPD Press, Yogyakarta, 2021.
15. Joe S. Migdal, **Strong Societies and weak state : State-Society Relations and State Capabilities in the World**, Princenton: Princenton University Press, 1998.
16. Jonathan Hopkin dalam Richard S. Kartz dan William Crotty, **Handbook Partai Politik**, Nusa Media, Bandung, 2001.
17. Arlan Siddha, **Klientelisme dalam Pilkada Serentak**, IPD Press, Yogyakarta, 2020.
18. Kim Litelnoni, **Apa Itu Oligarki**, Medium.com, 17 Agustus 2019, diakses 20 Juli 2021.
19. Richard Robinson dan Vedi R. Hafiz, **Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Market**, 2004.
20. Robert Endi Jaweng, **Korupsi dan Dinasti Politik**, 2017.
21. Vindry Florentin, **3 Jenis Dinasti Politik di Indonesia, Mulai Model Arisan hingga Lintas Kamar**, Tempo.co, 7 Januari 2017, diakses 26 Juli 2021.
22. Novendra Bimantara, **Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri**, <https://ejournal3.undip.ac.id/>

- <index.php/jpgs/article/download/21909/20170>, diakses tanggal 26 Juli 2020.
23. CNN Indonesia, **Pilkada Kediri, Anak Pramono Anung Menang Lawan Kotak Kosong**, 17 Desember 2020, diakses tanggal 10 Juli 2021.
 24. Abd. Halim, **Politik Lokal**, LP2B, Yogyakarta, 2014.
 25. E. Aspinall dan Mada Sukmajati, **Politik Uang di Indonesia**, PolGov, 2015.
 26. Dirk Tomsa, **Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era**, Routledge, London-New York, 2008.
 27. Yoes C. Kenawas, **Dynastic Politics: Indonesia' s News Normal**, 2020.
 28. E. Aspinall dan Ward Berenschot, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
 29. Nagara Institute, **Oligarki Indonesia Praktik dan Dampaknya pada Demokrasi dan Sistem Pemerintahan**, 12 Agustus 2020, nagarainstitute.com, diakses 12 Juli 2021.
 30. Endri Kurniati, **Oligarki Politik Menguat: Ini Penyebabnya Menurut Peneliti LIPI**, Tempo.co, 29 Maret 2019, diakses tanggal 14 Juli 2021.
 31. Ilham Budhiman, **Waspada Benturan Kepentingan Pejabat dari Parpol**, Kabar24.bisnis.com, 20 Maret 2019, diakses 27 Juli 2021.
 32. Fachrur Rozie, **KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah**, Merdeka.com, 20 Mei 2021, di akses tanggal 24 Juli 2021.
 33. Ardito Ramadhan, **KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung**, Kompas.com, 7 Agustus 2020, diakses tanggal 24 Juli 2021.

34. Vishnu Juwono dan Ima Mayasari, **Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional**, kpk.go.id, 14 Maret 2019, di akses tanggal 24 Juli 2021.
35. Emerson Yuntho, **Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah**, antikorupsi.org, 19 September 2018, di akses tanggal 24 Juli 2021.
36. Wasisto Raharjo Jati, **Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal**, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Volume 18, Nomor 2, 2013.
37. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, **Politik Lokal di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
38. Yosepha Pusparisa, **Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020**, Katadata.co.id, 12 Desember 2020, diakses tanggal 15 Juli 2021.
39. Erandhi Hutomo Saputra, **Dinasti Politik Tumbuh Subur, Bukti Pembatasan Kekuasaan Tidak Maksimal**, Mediaindonesia.com, 2 Januari 2017, diakses tanggal 15 Juli 2021.
40. ICW, **Dinasti Politik, Korupsi Daerah, dan Pilkada Serentak 2017**, antikorupsi.org, diakses tanggal 26 Juli 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., Elections and Normalization of Politics in Indonesia, South East Asia Research, 13(2), 2005.
- , dan Berenschot, Ward, Democracy for Sale, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- , dan Sukmajati, Mada, Politik Uang di Indonesia, PolGov, 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi, Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi, Perspektif Ketatanegaraan, Jurisprudensi, Vol. I, No. 2, September 2004.
- Bimantara, Novendra, Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/21909/20170>, diakses tanggal 26 Juli 2020.
- Budhiman, Ilham, Waspada Benturan Kepentingan Pejabat dari Parpol, Kabar24.bisnis.com, 20 Maret 2019, diakses 27 Juli 2021.
- Chang, Eric C., dan Chu, Yun-han, Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracy, the Journal of Politics, Vol 68 (2), Mei 2006.
- CNN Indonesia, Pilkada Kediri, Anak Pramono Anung Menang Lawan Kotak Kosong, 17 Desember 2020, diakses tanggal 10 Juli 2021.
- Erb, Maribeth, dan Sulistiyanto, Priyambudi, Deepening Democracy Indonesia? Direct Elections for Local Leaders

- (Pilkada), Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2009.
- Florentin, Vindry, 3 Jenis Dinasti Politik di Indonesia, Mulai Model Arisan hingga Lintas Kamar, Tempo.co, 7 Januari 2017, diakses 26 Juli 2021.
- Geys, Benny, Explaining Voter Turnout: a Review of Aggregate-Level Research, dalam *Electoral Studies* 25, 2016.
- Halim, Abd., Politik Lokal, LP2B, Yogyakarta, 2014.
- Held, David, Model of Democracy, Cambridge Polity Press, 1987.
- Heynes, Jeff., Democracy and Political Change in the Third World, London and New York, 2001.
- <http://Koran.tempco.co>, Pesta Keluarga Berkuasa (cover story), Edisi 20 Juli 2020, diakses tanggal 11 Juli 2021.
- ICW, Dinasti Politik, Korupsi Daerah, dan Pilkada Serentak 2017, antikorupsi.org, diakses tanggal 26 Juli 2021.
- Jati, Wasisto Raharjo, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Volume 18, Nomor 2, 2013.
- Jaweng, Robert Endi, Korupsi dan Dinasti Politik, 2017.
- Juwono, Vishnu dan Mayasari, Ima, Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional, kpk.go.id, 14 Maret 2019, di akses tanggal 24 Juli 2021.
- Kartz, Richard S., dan Crotty, William, Handbook Partai Politik, Nusa Media, Bandung, 2001.
- Kenawas, Yoes C., *Dynastic Politics: Indonesia's News Normal*, 2020.

- Kurniati, Endri, Oligarki Politik Menguat: Ini Penyebabnya Menurut Peneliti LIPI, Tempo.co, 29 Maret 2019, diakses tanggal 14 Juli 2021.
- Liddle, R. William, dan Mujani, Saiful, Islamist Parties and Democracy: The Indonesian Case, Makalah, Ohio State University, 2007.
- Litelnoni, Kim, Apa Itu Oligarki, Medium.com, 17 Agustus 2019, diakses 20 Juli 2021.
- Migdal, Joe S., Strong Societies and weak state : State-Society Relations and State Capabilities in the World, Princenton: Princenton University Press, 1998.
- Nagara Institute, Oligarki Indonesia Praktik dan Dampaknya pada Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, 12 Agustus 2020, nagarainstitute.com, diakses 12 Juli 2021.
- Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry van, Politik Lokal di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Pahlevi, Oktav, Orang Kuat dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2020, IPD Press, Yogyakarta, 2021.
- Pradhanawati, Ari, Kontestasi Orang Kuat Dalam Pilkada, IPD Press, Yogyakarta, 2021.
- Pusparisa, Yosepha, Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020, Katadata.co.id, 12 Desember 2020, diakses tanggal 15 Juli 2021.
- Ramadhan, Ardito, KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung, Kompas.com, 7 Agustus 2020, diakses tanggal 24 Juli 2021.

- Robinson, Richard, dan Hafiz, Vedi R., *Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Market*, 2004.
- Rozie, Fachrur, *KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah*, Merdeka.com, 20 Mei 2021, di akses tanggal 24 Juli 2021.
- Sahdan, Gregorius dan Husodo, Besar Tirto, *Transformasi Orang Kuat dalam Pilkada Serentak 2020*, IPD Press, Yogyakarta, 2021.
- Saputra, Erandhi Hutomo, *Dinasti Politik Tumbuh Subur, Bukti Pembatasan Kekuasaan Tidak Maksimal*, Mediaindonesia.com, 2 Januari 2017, diakses tanggal 15 Juli 2021.
- Siddha, Arlan, *Klientelisme dalam Pilkada Serentak*, IPD Press, Yogyakarta, 2020.
- Tjenreng, MB. Zubakhum, *Pilkada Serentak*, Pustaka Kemang, Depok, 2016.
- Tomsa, Dirk, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era*, Routledge, London-New York, 2008.
- Yamin, Ilham, *Democracy and Incumbent Political Power; Takalar Election 2007*, Incodec IPDN.
- Yuntho, Emerson, *Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah*, antikorupsi.org, 19 September 2018, di akses tanggal 24 Juli 2021.

TENTANG PENULIS



Amalia Syauket, dosen profesional dalam bidang ilmu pemerintahan. Ber-home base pada program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2018. Aktif melaksanakan tridarma dalam bidang anti korupsi dan otonomi daerah, sebagai Peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi juga sebagai dosen Koordinator Pendidikan Anti Korupsi, Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya.

Telah menyelesaikan program Doktor dari Universitas Padjadjaran tahun 2013 pada program studi ilmu pemerintahan. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan Magister ilmu pemerintahan dari Universitas Satyagama. Menyelesaikan Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman.

Beberapa publikasi terbaik, antara lain:

- 2021, Octopussy: Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta.
- 2021, Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi, Buku Ajar.
- 2020, Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Monograf, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta.
- 2020, Woman Government Officials in The Circle of Corruption, Proceeding, ICJSET.
- 2019, Perempuan dalam Pusaran Korupsi, Monograf, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta
- 2019, Corruption & Patron-Client (Understanding Shadow State Case in Banten), Proceeding, Atlantis Press.
- 2019, Perspektif Human Security pada Implementasi Otonomi Daerah, Modul Pembelajaran.

